

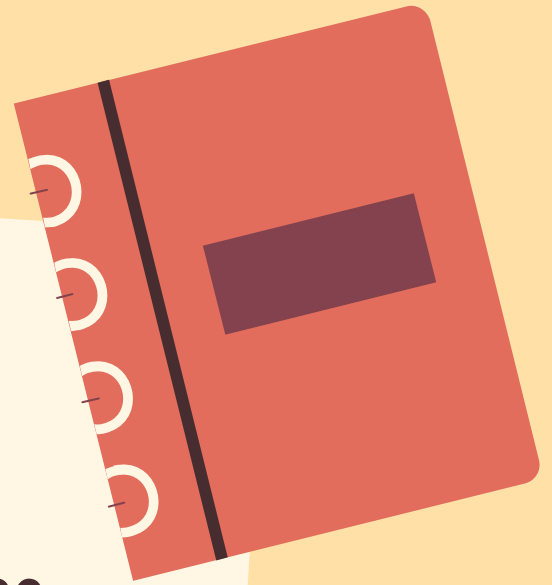


Rufina Aribarahmani (2010112113)  
Saffanah Zerlina W (2010112122)  
Annisa Devina Azzahra (2010112124)  
Dwi Fitri Ramadhanti (2010112125)

**PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK**

01

Profil Corporate Governance  
dan lingkup perusahaan



# PROFIL PERUSAHAAN

- Didirikan 11 Januari 1982 dengan nama PT Duta Graha Indah
- Bergerak dibidang konstruksi, energi, pertambangan, real estate
- Terdaftar di bursa efek 19 Desember 2007
- Alamat Perusahaan :  
ITS Office Tower Tower (Niffaro Park) Jl. Raya pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan.
- Memiliki anak perusahaan PT Inti Duta energy dan PT Duta Buana Permata



# Visi dan Misi PT NKE

## Visi :

Menjadi Perusahaan yang unggul dalam melakukan diversifikasi bisnis konstruksi, enjiniring, dan investasi di Indonesia



## Misi :

1. Mengembangkan organisasi yang selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan.
2. Mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) dan memaksimalkan kepentingan dari stakeholders
3. Selalu melakukan inovasi-inovasi baru terhadap potensi bisnis untuk meningkatkan kinerja dan profitabilitas.
4. Menjadi pelopor pengembangan metode kerja, peralatan, teknologi dan sistem manajemen yang terintegrasi dalam bisnis konstruksi.
5. Menciptakan sinergi strategis dengan vendor, mitra bisnis dan klien.

# Penerapan Prinsip Tata Kelola

Untuk mempersiapkan diri dari adanya perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif, menciptakan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan dan menentukan peran dan akuntabilitas yang jelas bagi seluruh karyawan di setiap tingkat organisasi, maka NKE berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas penerapan praktik terbaik Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. Terdapat 5 (lima) prinsip GCG yang diterapkan Perseroan, antara lain:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Pertanggungjawaban
4. Kemandirian
5. Kewajaran

# Kronologi Kasus GCG PT NKE

- KPK menetapkan PT NKE sebagai tersangka pada 24 Juli 2017
- Perusahaan dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RS Pendidikan
- Menimbulkan kerugian negara sebesar 25,953 miliar
- Didakwa melawan hukum membuat kesepakatan memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek pembangunan RS khusus infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 - 2010
- Memperkaya korporasi sejumlah 24, 778 miliar
- PT NKE divonis membayar denda pidana sebesar 700 juta dan membayar uang pengganti sekitar 85 miliar



# Struktur CG

Struktur Tata Kelola dan Kebijakan Perusahaan pada PT NKE terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Audit Internal, Sekretaris perusahaan, Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi.

## 1. RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah bagian Perseroan yang memiliki wewenang tertinggi yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi. RUPS menjadi forum yang sah bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kinerja mereka kepada para pemegang saham. Pada tahun 2016, PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 2 Juni 2016 bertempat di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta. Pada tanggal 15 Desember 2016, Perseroan kembali mengadakan RUPS Luar Biasa di Hotel Grandhika Iskandarsyah Jakarta.

# Struktur CG

## 2. Dewan Komisaris

PT NKE memiliki 1 komisaris utama, 2 komisaris independent, dan 2 komisaris. Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris PT NKE telah melakukan rapat rutin mingguan/bulanan sebanyak 11 kali.

Name / Nama	Position / Jabatan	Total Meeting / Jumlah Rapat	Total Attendance / Jumlah Kehadiran	%
Latief Effendi Setiono	President Commissioner / Komisaris Utama	11	11	100
Soehandjono	Independent Commissioner / Komisaris Independen	11	11	100
Bambang Sulistomo*	Independent Commissioner / Komisaris Independen	3	3	100
Roy Edison Maningkas	Commissioner / Komisaris	11	5	45,45
Rony N. Hendropriyono*	Commissioner / Komisaris	3	2	66,66

\*has been serving as the Board of Commissioners since October 5, 2017.      \*menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak 5 Oktober 2017.

## 3. Direksi

PT NKE memiliki 1 direktur utama, 1 direktur independent, 2 direktur. Sepanjang tahun 2017, Direksi telah melakukan rapat rutin mingguan/bulanan sebanyak 35 kali.

Name / Nama	Position / Jabatan	Total Meeting / Jumlah Rapat	Total Attendance / Jumlah Kehadiran	%
Djoko Eko Suprastowo	President Director / Direktur Utama	35	23	65.71
Ganda Kusuma	Director / Direktur	35	35	100
Budi Susilo Sadiman*)	Director / Direktur	7	7	100
Harry Soesilo Alim	Independent Director / Direktur Independen	35	29	82.8

\*) efektif terhitung setelah pengangkatan beliau pada RUPS LB 2 Juni 2017      \*) effective since his appointment through the EGMS on June 2, 2017



# Struktur CG

## 2. Komite Audit

PT NKE memiliki 1 ketua komite audit dan 4 anggota komite audit. Pada tahun 2017, Komite Audit telah melakukan rapat rutin mingguan/bulanan sebanyak 5 kali.

Name / Nama	Position / Posisi	Total Meeting / Jumlah Rapat	Total Attendance / Jumlah Kehadiran	%
Soehandjono	Audit Committee Chairman / Ketua Komite Audit	5	5	100
Latief Effendi Setiono	Audit Committee Member / Anggota Komite Audit	5	5	100
J. L. P. Damar	Audit Committee Member / Anggota Komite Audit	5	5	100
Arry Syarif	Audit Committee Member / Anggota Komite Audit	5	5	100
Soenarso Soemodiwirjo	Audit Committee Member / Anggota Komite Audit	5	5	100

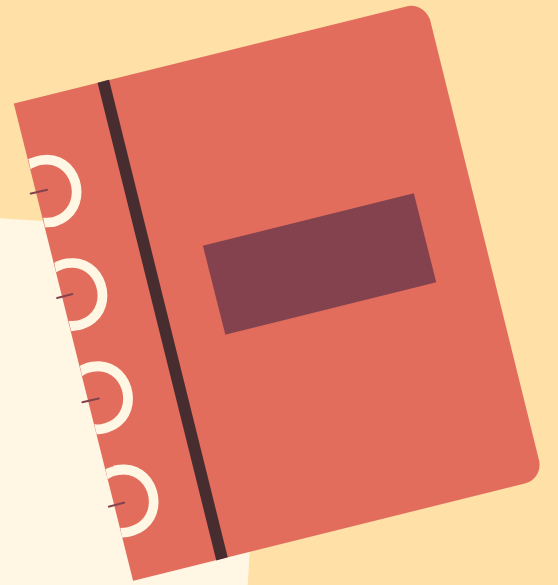
## 3. Komite Nominasi dan Remunerasi

PT NKE memiliki 4 Komite Remunerasi dan Nominasi yang terdiri dari 1 ketua dan 3 anggota. Pada tahun 2017, komite ini telah melakukan rapat internal sebanyak 8 kali

Name / Nama	Position / Jabatan	Total Meeting / Jumlah Rapat	Total Attendance / Jumlah Kehadiran	%
Bambang Sulistomo	Chairman / Ketua	2	2	100
Latief Effendi Setiono	Member / Anggota	2	2	100
Gunawan	Member / Anggota	2	2	100
Wasito Adi	Member / Anggota	2	2	100

02

Efektivitas Penerapan  
Corporate Governance



# Penerapan GCG

## PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP GCG:

### 1. Transparency (Keterbukaan)

- PT NKE melanggar prinsip keterbukaan karena meminta bantuan kepada Muhammad Nazaruddin (anggota DPR) dan panitia tender proyek pembangunan untuk memenangkan lelang.
- PT NKE memberi fee kepada Muhammad Nazaruddin sebesar 15% dari nilai *rill cost* kontrak.
- PT NKE memberikan fee melalui perusahaan yang dikendalikannya, seperti PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, PT Grup Permai dengan cara seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan subkontrak PT NKE atau menerima pembayaran atas material yang dibeli oleh PT NKE.

## 2. Honesty & Integrity (Kejujuran & Integritas)

- PT NKE menyatakan pekerjaan telah selesai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada pembangunan tahap II. PT NKE menyatakan pekerjaan telah selesai 100% di saat proyek baru terealisasi sebesar 57,49% (ahli ITB).
- PT NKE memberikan fee melalui perusahaan yang dikendalikannya, seperti PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, PT Grup Permai dengan cara seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan subkontrak PT NKE atau menerima pembayaran atas material yang dibeli oleh PT NKE.
- Kecurangan dan kebohongan yang dilakukan PT NKE mengartikan bahwa mereka juga melanggar prinsip integritas karena tidak berperilaku dengan standar yang tinggi secara profesional dan moral yang kuat.

### 3. Independence

Dengan tersalurkannya fee dari PT NKE ke Muhammad Nazaruddin menggunakan alasan yang dibuat-buat untuk menutupi kecurangan, ini berarti telah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak tersebut untuk melancarkan aksi korupsi. Adanya kerja sama ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memegang prinsip independensi sebagaimana perusahaan yang baik seharusnya dijalankan.

#### 4. Fairness (Kewajaran)

Kebohongan PT NKE yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Kecurangan perusahaan dalam memenangkan lelang dan kebohongan ini menjadi bukti bahwa PT NKE melanggar prinsip *fairness* karena hanya ingin menguntungkan perusahaan dan pihak yang terlibat dalam kasus serta berperilaku tidak wajar tanpa memikirkan kerugian yang didapat pihak lain.

## 5. Responsibility (Tanggung Jawab)

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT NKE menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki tanggung jawab yang baik dalam implementasi GCG (Good Corporate Governance). Tindak korupsi pada PT NKE mengartikan adanya ketidaksesuaian pengelolaan perusahaan terhadap prinsip yang sehat dan peraturan yang berlaku.

# 03

## Analisis Implementasi dan Masalah Efektivitas Corporate Governance





# ORIENTASI / DASAR TEORI YANG MENDASARI IMPLEMENTASI GCG PADA OBJEK

1. Stakeholder Theory merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* yang lebih luas.

Berdasarkan kasus di atas, PT. NKE melakukan kecurangan dengan menetapkan bahwa pekerjaan telah selesai 100% padahal penelitian yang telah dilakukan bangunan tersebut belum terealisasi 100% sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa PT. NKE tidak memperhatikan kepentingan bagi stakeholder secara luas tetapi hanya mementingkan kepentingan beberapa stakeholder saja.

2. Stewardship Theory adalah teori yang menjelaskan bahwa manajemen tidak termotivasi untuk memenuhi tujuan individu saja, melainkan juga harus mementingkan tujuan bersama demi kepentingan perusahaan dan *principal*.

Berdasarkan kasus di atas, PT.NKE diketahui ingin memperkaya perusahaan tetapi tindakan yang dilakukannya salah karena PT. NKE melakukan tindakan korupsi yang akhirnya dapat berdampak kepada perusahaannya itu sendiri.

# Analisis Efektifitas Boards dalam Penerapan GCG PT NKE

## Director

Dengan adanya kejadian korupsi, peran boards dalam penerapan GCG PT NKE dinilai kurang efektif. Dari sisi direksi, orang yang memegang posisi ini diharuskan menjadi seseorang yang profesional dalam menjalankan tugasnya, yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Tetapi, direksi PT NKE tidak menunjukkan keprofesionalannya dalam menjalankan tugasnya karena justru memperkaya korporasi dengan cara korupsi.

Tersangka tindakan korupsi merupakan Dudung Purwadi (DPW) mantan Direktur Utama PT DGI dan Made Meregawa.

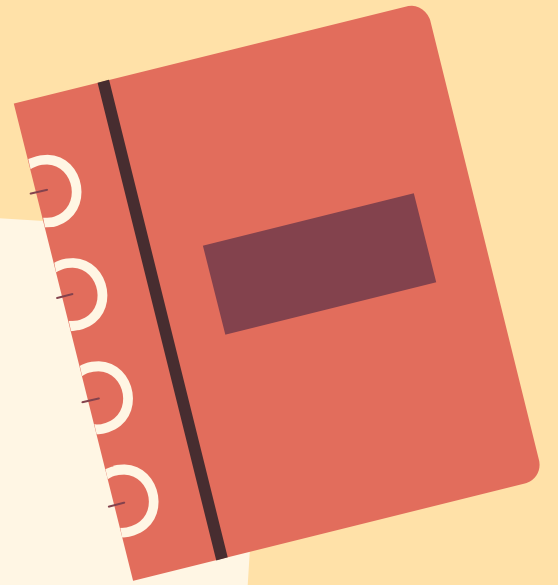
## Board of Committee

Keberadaan komite menjadi suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian Dewan Komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan yang baik (Governance) oleh manajemen.

Dewan Komite PT NKE tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena salah satu pengelola perusahaan yaitu direksi, malah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pemerintah untuk membangun rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana. Dewan Komite juga gagal untuk membuat PT NKE menaati etika sekaligus tanggung jawab sosial untuk membantu memajukan kesehatan Indonesia.

# 04

## Kesimpulan dan Rekomendasi



# KESIMPULAN

1. Pada tanggal 24 Juli 2017, Komisi Pemberantas Korupsi menetapkan PT NKE sebagai tersangka. Perusahaan ini dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010. Dampak dari kasus tersebut, PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) divonis membayar pidana denda sebesar Rp 700 juta. PT NKE juga dipidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 85.490.234.737. Majelis hakim juga mencabut hak perusahaan untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama enam bulan.
2. Kasus korupsi yang terjadi pada PT NKE memberikan kesan buruk bagi perusahaan. 13 hari setelah penetapan sebagai tersangka oleh kpk mengakibatkan Bursa Efek Indonesia membekukan saham aktivitas jual beli saham PT NKE. Selain itu, kepercayaan bank terhadap perusahaan ini menjadi menurun. Permasalahan yang terjadi menyebabkan perusahaan ini mengalami banyak kerugian dan telah melanggar prinsip-prinsip good corporate governance

# Rekomendasi

1. Perusahaan perlu membenahi manajemen dan menyusun sistem yang paten disertai peraturan dan keamanan yang ketat agar kecurangan-kecurangan sekecil apa pun tidak terjadi. Perusahaan juga hendaknya menerapkan moral yang baik pada diri masing-masing agar memiliki kesadaran tinggi untuk dapat berlaku sesuai prinsip yang sehat sehingga GCG terimplementasikan.
2. Perusahaan perlu memikirkan secara matang setiap keputusan yang akan dibuat agar keputusan tersebut tidak hanya menguntungkan beberapa pihak saja tetapi juga semua pihak yang terlibat. Selain itu, perusahaan juga harus bisa mengambil suatu tindakan yang benar dan selalu mempertimbangkan resiko dari setiap tindakan yang akan dilakukan.
3. Boards of Committee perusahaan perlu meningkatkan pengawasannya terhadap direksi. Jika direksi sudah mulai menunjukkan sikap tidak profesional yang mengarah kepada perbuatan korupsi, sebaiknya segera diganti.



**B**

**TERIMA KASIH**

**A**

**C**